

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013-2017**

**Taufik Abdurrahman
20150430330**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
E-mail korespondensi: Taufikabdur@gmail.com

Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasi, dan Rasio Belanja Modal diukur sebagai indikator Kinerja Keuangan Daerah yang menjadi variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen. Penelitian ini mengambil sampel 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. Metode analisis yang digunakan adalah data panel dengan menggabungkan *cross section* dan *time series*. Model terpilih digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai koefisien sebesar 0,020121 dan nilai probabilitas sebesar 0,0440, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah mempunyai nilai koefisien 0,033415 dan nilai probabilitas sebesar 0,0452, Rasio Belanja Operasi mempunyai nilai koefisien 0,247015 dan probabilitas sebesar 0,0189, Rasio Belanja Modal diperoleh nilai koefisien sebesar 0,248194 dan probabilitas 0,0185 dapat disimpulkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai nilai koefisien sebesar 0,009257 dan nilai probabilitas 0,7608 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstrack: *This study aims to determine the effect of regional financial performance on economic growth. The Effectiveness of Regional Original Income Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Operating Expenditure Ratio, and Capital Expenditure Ratio are measured as indicators of Regional Financial Performance which are independent variables and Economic Growth as the dependent variable. This study*

took a sample of 6 districts / cities in Central Java Province in 2013-2017. The analytical method used is panel data by combining cross section and time series. The selected model used is the Fixed Effect Model. Based on the analysis that has been done shows the results that the Effectiveness of the Regional Original Income Ratio has a coefficient of 0.020121 and a probability value of 0.0440, the Regional Financial Efficiency Ratio has a coefficient value of 0.033415 and a probability value of 0.0452, the Operational Expenditure Ratio has coefficient value of 0.247015 and probability of 0.0189, Capital Expenditure Ratio obtained coefficient value of 0.248194 and probability of 0.0185 can be concluded to have a positive and significant effect on economic growth, while the Regional Financial Independence Ratio has a coefficient of 0.009257 and a probability value of 0.7608 has a positive effect but is not significant for Economic Growth.

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Income and Expenditure Budget, Local Government, Economic Growth.

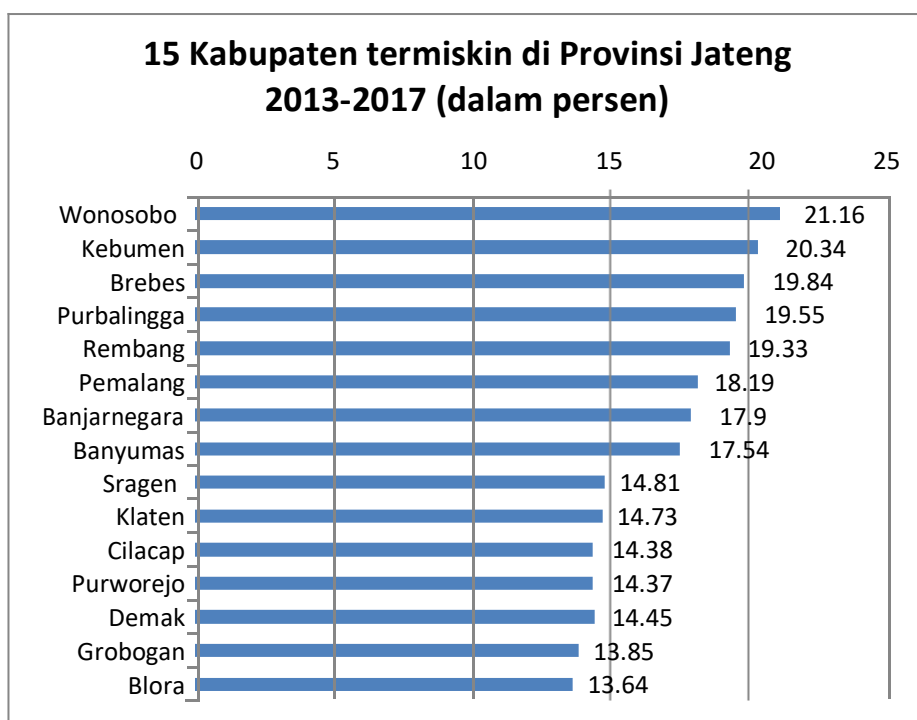
PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah dituntut dapat mengoptimalkan dana anggaran yang telah direncanakan. Hal ini menyangkut kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang nantinya akan diukur kinerjanya. Otonomi daerah ditujukan agar dapat mengelola secara mandiri baik pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh kabupaten/kota serta agar tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat. Sebagai tujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya pemerintah daerah juga harus mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang melakukan proses pembangunan daerah.

Pemerintah daerah berhak mengelola serta mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah yang tercantum pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam

memberikan anggaran tentu saja pemerintah pusat melihat potensi dan kondisi suatu wilayah untuk menganalisis perekonomian serta sumber daya yang ada di daerah tersebut agar efektif dan efisien. Alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah cukup banyak, diantaranya adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dwiyandari dan Badera, 2018).

Penelitian ini yaitu meneliti tentang kinerja keuangan daerah kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan *purposive sampling*. Berikut ini adalah wilayah yang digunakan dalam penelitian yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan, jadi total ada 5 Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten tersebut dijadikan sampel karena masih termasuk kedalam 15 besar kabupaten termiskin dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Adapun data yang menunjukkan fenomena tersebut adalah:



Sumber : BPS Jawa Tengah (Data Diolah)

Gambar 1
15 Kabupaten termiskin di Jawa Tengah

Dari data diatas bisa dilihat bahwa Kabupaten Wonosobo menempati posisi paling atas tingkat Kemiskinan dengan 21.16 persen diikuti Kabupaten Kebumen nomer dua dengan 20.34 persen. Kabupaten Pemasang menempati posisi ke enam daerah miskin dengan presentase 18.19 persen, kemudian Kabupaten Banyumas berada di urutan ke delapan dengan 17.54 persen. Selanjutnya Kabupaten Klaten menempati urutan ke sepuluh dengan 14.73 persen.

Berdasarkan latar yang telah diuraikan diatas, penulis melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Peran Pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah di setiap Kabupaten/Kota juga sangat penting dalam mengatur keuangan daerahnya untuk meningkatkan perekonomian agar dapat tumbuh dan stabil oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
2. Mengetahui pengaruh Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
3. Mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
4. Mengetahui pengaruh Rasio Belanja Operasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?
5. Mengetahui pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 ?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2005). Jika pencapaian melebihi daripada yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja tersebut sangat bagus. Namun apabila pencapaian tidak sesuai atau kurang dari yang telah direncanakan, maka kinerjanya buruk.

Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi tertentu sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan (Artanti, 2010). Adapun indikator pengukuran kinerja keuangan daerah pada penelitian ini yaitu, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal, yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{a. Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{b. Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{c. Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$d. \text{ Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$e. \text{ Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi atau disebut juga PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kesejahteraan penduduk meningkat (Sukirno, 2000).

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada “proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh sebab itu, pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian dapat dinilai efektivitasnya.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

D. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan antara Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Efektivitas merupakan gambaran kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin banyak nilai presentase rasio efektivitas yang diperoleh maka semakin efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya kemudian akan berdampak positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Hubungan antara Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Efisiensi menunjukkan besarnya Total Realisasi Belanja Daerah dibandingkan Anggaran Belanja Daerah yang telah direncanakan oleh pemerintah. Semakin kecil perbandingan antara dana yang dibelanjakan dengan anggaran maka semakin efisien. Artinya pemerintah daerah tidak menghabiskan dana anggarannya dan dapat digunakan untuk keperluan lainnya selanjutnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Hubungan Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Kemandirian menunjukkan perbandingan antara PAD dengan Total pendapatan Transfer atau bantuan dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Semakin tinggi presentase rasio kemandirian yang diperoleh maka dapat dikatakan semakin mandiri daerah tersebut. Artinya perekonomian sudah

cukup bagus karena sudah mempunyai PAD yang mencukupi yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak positif.

d. Hubungan Rasio Belanja Operasional dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Belanja Operasional menggambarkan perbandingan Belanja Operasional dengan Total Belanja Daerah yang telah dibelanjakan. Belanja operasi seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dsb. Semakin tinggi belanja maka daerah semakin banyak mempunyai barang dan jasa. Artinya pemerintah semakin tinggi peluangnya dalam menambah jumlah PDRB yang dapat menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif.

e. Hubungan Antara Rasio Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dibandingkan Total Belanja Daerah. Belanja modal yaitu belanja infrastruktur seperti Belanja tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Aset tetap, dsb. Semakin baik infrastrukturnya di suatu daerah maka akan semakin baik juga perekonomian karena di dukung oleh fasilitas yang memadai. Jadi belanja modal akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku-buku atau *literature* pada instansi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari website maupun instansi resmi keuangan daerah yang terkait. Adapun data yang diperoleh yaitu Laporan Realisasi APBD yang dikaji kemudian dijadikan variabel penelitian yaitu: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasional, Rasio Belanja Modal,

sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

B. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yakni penarikan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian (Suharyadi, 2009). Syarat yang digunakan sebagai kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut ini:

1. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah mempublikasikan data Laporan Realisasi APBD pada tahun 2013-2017.
2. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki data tingkat PDRB atas harga dasar konstan tahun 2013-2017.
3. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masih tertinggal dan fluktuatif tingkat pertumbuhan ekonominya.

C. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis data panel, yaitu bertujuan untuk mengetahui dan pengaruh terhadap variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Data panel merupakan gabungan data runtut waktu (*time series*). Model regresi data panel penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + b_4X_{4it} + b_5X_{5it} + e$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

b (1...5) = Koefisien

X₁ = Variabel Rasio Efektivitas

- X₂ = Variabel Rasio Efisiensi
- X₃ = Variabel Rasio Kemandirian
- X₄ = Variabel Rasio Belanja Operasional
- X₅ = Variabel Rasio Belanja Modal
- t = Waktu
- e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan metode ini gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel *independent* terhadap nilai absolut residunya (e), apabila signifikan korelasi > 0,05 maka model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskestisitas dalam penelitian ini di tunjukkan pada tabel 1

Tabel 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.255099	5.538013	-1.490625	0.1525
REPAD?	-0.004391	0.005012	-0.876249	0.3918
REKD?	0.011797	0.008376	1.408439	0.1752
RKGD?	0.009267	0.016102	0.575538	0.5717
RBO?	0.080613	0.051705	1.559093	0.1355
RBM?	0.069627	0.051759	1.345219	0.1944

Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0

Keterangan:

- C = Konstanta dari Pertumbuhan Ekonomi
- REPAD = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
- REKD = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

RBO = Rasio Belanja Operasi

RBM = Rasio Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

2. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika koefisien $> 0,9$ maka dapat terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi. Berikut tabel dibawah ini hasil Uji Multikolinearitas.

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

	_BANYUMAS	_KEBUMEN	_WONOSOBO	_KLATEN	_PEMALANG	_KOTAPEKALONGAN
_BANYUMAS	1.000000	-0.285235	-0.302468	0.396216	0.584917	0.530798
_KEBUMEN	-0.285235	1.000000	-0.276708	-0.261674	0.008507	-0.420214
_WONOSOBO	-0.302468	-0.276708	1.000000	-0.118282	-0.117891	-0.33774
_KLATEN	0.396216	-0.261674	-0.118282	1.000000	0.894616	-0.384963
_PEMALANG	0.584917	0.008507	-0.117891	0.894616	1.000000	-0.35609
_KOTAPEKALONGAN	0.530798	-0.420214	-0.33774	-0.384963	-0.35609	1.000000

Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0

Berdasarkan tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien antar variabel bebas $< 0,9$ artinya bahwa pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas pada masing-masing variabel.

B. Analisis Pemilihan Model

1. Uji Chow (Uji Likelihood)

Uji chow bertujuan untuk menentukan model yang akan digunakan yaitu *fixed effect* atau *common effect*.

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila probabilitas chi-square diperoleh kurang dari alpha 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil dari estimasi menggunakan uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.62836	(5,19)	0.0004
Cross-section Chi-square	33.0329	5	0.0000

Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas *cross-section* F sebesar 0.0004 dan probabilitas *cross-section* Chi-square adalah 0.0000 yang lebih kecil dari alpha 5% sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji Chow, model regresi yang terbaik adalah model *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk memilih antara metode *fixed effect* atau *random effect*. Apabila hasil dari Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas yang kurang dari alpha 5% maka H_0 ditolak dan metode *fixed effect* yang dipilih untuk mengolah data panel. Akan tetapi, jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% maka H_0 diterima model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect*.

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Berikut adalah hasil Uji Hausman pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 yaitu :

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	38.141808	5	0.0000

Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *cross-section* random adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 5% yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terbaik digunakan dalam penelitian ini berdasarkan uji hausman adalah *fixed effect*.

C. Hasil Estimasi Model Data Panel

Setelah menguji model uji spesifikasi yang sudah dilakukan dan membandingkan nilai terbaik, maka model regresi data panel pada penelitian ini adalah menggunakan *fixed effect model (FEM)* sehingga menghasilkan hasil estimasi sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Estimasi Fixed Effect

Variabel	Koefisien	Prob.
REPAD	0.020121	0.0440
REKD	0.033415	0.0452
RKKD	0.009257	0.7608
RBO	0.247015	0.0189
RBM	0.248194	0.0185

Sumber: Hasil Olahan Eviews 7.0

Dengan menggunakan model fixed, ada 4 variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu, variabel Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) dengan probabilitas 0.0266, variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dengan probabilitas 0.0440, variabel Rasio Belanja Operasi (RBO) dengan probabilitas 0.0189, dan variabel Rasio Belanja Modal (RBM) dengan probabilitas 0.0185.

Berikut ini merupakan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun (2013-2017).

D. Uji Statistik

1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependennya. Hasil uji F penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji F

Variabel	F-Statistic	Prob.	Hasil
REPAD	7.663671	0.000083	Diterima
REKD			
RKKD			
RBO			
RBM			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 7.0

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diperoleh nilai F-statistik sebesar 7.663671 dengan probabilitas sebesar 0.000083, artinya nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% ($0.000083 < 0,05$), sehingga variabel independen Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasi, dan Rasio Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

2. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi, serta untuk melihat variabel independen manakah yang paling berpengaruh. Berikut hasil uji t- statistik dalam penelitian ini dari masing-masing variabel independen.

Tabel 6 Uji T Statistik

Variabel	Koefisien Regresi	T-Statistik	Prob	Standart Prob
REPAD	0.020121	2.157108	0.0440	5%
REKD	0.033415	2.143507	0.0452	5%
RKKD	0.009257	0.308893	0.7608	5%
RBO	0.247015	2.566784	0.0189	5%
RBM	0.248194	2.576336	0.0185	5%

Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0

Pada Tabel 5.7 hasil uji t statistik bahwa masing-masing variabel independen memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel dependen.

a. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki t-statistik 2.157108 dengan probabilitas sebesar 0.0440 dan koefisien regresi sebesar 0.020121, yang artinya pada penelitian ini variabel Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

b. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki t-statistik sebesar 2.143507 dan memiliki probabilitas 0.0452 serta koefisien regresi 0.033415, yang berarti bahwa dalam penelitian ini variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

c. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki t-statistik sebesar 0.308893 dan probabilitas 0.7608 dan koefisien regresi sebesar 0.009257, artinya bahwa penelitian ini pada variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

d. Pengaruh Rasio Belanja Operasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Nilai t-statistik pada variabel Rasio Belanja Operasi sebesar 2.566784 dan nilai probabilitas 0.0189 serta memiliki koefisien regresi 0.247015, dapat diartikan bahwa pada penelitian ini variabel Rasio Belanja Operasi berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

e. Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil analisis variabel Rasio Belanja Modal memiliki t-statistik 2.576336 dengan nilai probabilitas 0.0185 dan koefisien regresi sebesar 0.248194, artinya variabel Rasio Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh model menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi model *fixed effect* ini menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.801332, dapat diartikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 80,1 persen dipengaruhi oleh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasi, dan Rasio Belanja Modal. Sedangkan sisanya 19,9 persen dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, REPAD memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0440 artinya, bahwa variabel rasio efektivitas pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0.020121 artinya, apabila REPAD naik 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen dengan asumsi jumlah variabel bebas tidak berubah. Hal ini sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Yulianah (2017) yang menyatakan bahwa variabel rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu pada penelitian Kartika Berliani (2016) memperoleh hasil uji hipotesis untuk pengaruh efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi, efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,0001.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah merupakan kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat, dikarenakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sudah lebih dari pendapatan yang dianggarkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif apabila rasio efektivitas maka kinerja pemerintahan pun semakin baik (Halim, 2008).

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima Nilai koefisien regresi rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 0.033415 dan nilai probabilitas 0.0452, yang artinya bahwa jika terjadi peningkatan rasio efisiensi 1 persen maka

akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,03 persen dengan asumsi tidak ada perubahan dalam jumlah variabel bebas.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian terdahulu Kartika Berliani (2015) diperoleh kesimpulan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,001. Dengan adanya efisiensi, maka sebagai anggaran yang dialokasikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pada variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0.009257 dan nilai probabilitas sebesar 0.7608, yang artinya bahwa variabel rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, maka hipotesis di tolak.

Hasil penelitian Budi Saputra, Yohanes Vyn Amzar, Purwaka H.P (2015) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Jambi selama periode penelitian mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan. Namun secara statistik, angka probabilitas sebesar 0.0622, yang artinya lebih besar dari $\alpha = 5\%$, menunjukkan bahwa meskipun rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Keadaan tersebut terjadi karena tidak ada pengaruh secara langsung antara variabel kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Belanja Operasi adalah memiliki nilai koefisien sebesar 0.247015, yang artinya bahwa apabila terjadi kenaikan rasio belanja operasi sebesar 1 persen, maka akan meningkat juga tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota pada penelitian ini sebesar 0,24 persen

dengan asumsi tidak ada perubahan dalam jumlah variabel bebas. Hal ini sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Norista Gathama Putra (2011) menurut hasil analisis menunjukkan hubungan yang sesuai dengan hipotesis awal yaitu positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal yang dilakukan pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Begitu juga dengan alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk belanja operasi, menurut hasil analisis juga menunjukkan hubungan yang sesuai dengan hipotesis awal yaitu positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan alokasi anggaran untuk belanja operasi yang dilakukan pemerintah juga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Rasio Belanja Modal memperoleh nilai koefisien 0.248194, artinya setiap kenaikan 1 persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen, dengan asumsi tidak terjadi perubahan pada jumlah variabel bebas yang lain. Ini tidak jauh berbeda dengan variabel rasio belanja operasi. Variabel rasio belanja modal menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto (2011) dengan kesimpulan Alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Selain itu sejalan dengan penelitian I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina (2015) bahwa derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal, sedangkan kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang selama ini ditentukan oleh alokasi

belanja modal yang dilaksanakan pemerintah, dan semakin tinggi alokasi biaya modal yang dikeluarkan, maka dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal, memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan. Dapat disimpulkan masih rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sehingga tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, karena daerah yang ada pada penelitian ini rata-rata memiliki rasio kemandirian keuangan daerah dibawah 25 persen.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika PAD sudah meningkat maka kemandirian daerah pun akan meningkat dan mengurangi beban biaya transfer pemerintah pusat. Salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan benar agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pemerolehan pendapatan asli daerah.

Pada wilayah Jawa Tengah masih banyak terdapat penduduk dibawah garis kemiskinan dan tidak mampu hidup dengan standar yang layak. Penyebabnya antara lain pengangguran, ketidakmampuan berkompetisi akibat rendahnya pendidikan, serta tingginya angka kurang gizi dan gizi buruk pada anak balita. Untuk itu perlu diprioritaskan penuntasan permasalahan ini lewat program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah, pengendalian jumlah penduduk untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menjangkau lapis pendidikan. Peningkatan lapangan pekerjaan hanya dapat didukung dengan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Isu ini juga diangkat karena

nilai realisasi PMA dan PMDN yang relatif besar ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja akibat daya saing potensi industri lokal yang kurang baik. Selain itu masih terdapat permasalahan kewenangan perizinan penanaman modal dan kesiapan sumber daya aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsa, Ketut dan Setiawan. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tahun 2006 s.d 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 20. No. 2.
- Artanti, Yulia, N. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Astuti, W. (2015). “ Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan”. *Jurnal EBBANK* Volume 6 No. 1 Juli 2015.
- Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta
- Berliani, K. (2016).” Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka”. *Jurnal Indonesia Membangun*, Vol. 2, No. 1, Mei-Agustus 2016.
- Dwiyandari, Y. D. L., & Badera, N. D. I. (2018). “Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayama*, Vol. 22, 3 Maret 2018.
- Halim, Abdul. 2008. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi, (2008) “Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)” *Jurnal SNA XI Pontianak*.
- Meier, M.G. 1995. *Leading Issues in Economics Development*, Sixth Edition. Singapore: Mc. Graw Hill.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Risyanto, H. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. *Coopetition*, 6(1), 21.
- Saputra, B., Amzar, Y. V., & Prihanto, P. H. (2016). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. *EKO-REGIONAL JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH*, 10(2).
- Suharyadi dan Purwanto. (2009). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pegantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2).


SKRIPSI


**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017**


***ANALYSIS ON EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON
ECONOMIC GROWTH DISTRICT/CITY IN THE CENTRAL JAVA
PROVINCE YEARS 2013-2017***

Diajukan oleh
TAUFIK ABDURRAHMAN
20150430330

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji
Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal 26 Juni 2019
Yang terdiri dari


Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si.
Ketua Tim Penguji


Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
Anggota Tim Penguji


Diah Setyawati Dewanti, SE., M.Sc., Ph.D.
Anggota Tim Penguji

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Rizal Yaya, SE., M.Sc., Ph.D., Ak, CA
NIK: 19731218199904 143 068